

PLANNING (PERENCANAAN) DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Moh. Arifudin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Moharifudin2018@gmail.com

Fathma Zahara Sholeha

Institut Agama Islam Riyadhotul Mujahidin
Ponorogo
fathma.zahara.fz@gmail.com

Lilis Fikriya Umami

PEMKAB Tulungagung
Umamifikriya09@gmail.com

Abstract: *Planning is needed by various forms of organization, because this planning is the basic process of management in making decisions and actions. Planning is needed in any type of activity, whether it be organizational, corporate or community activities, and planning exists in every management function, because these functions can only carry out the decisions that have been determined in the planning. This article aims to explain the importance of planning in the Islamic education system. The results show that in management, planning is the process of defining organizational goals, creating strategies to achieve those goals, and developing organizational work activity plans. Planning is the most important process of all management functions because without planning the other functions of organizing, directing, and controlling will not be able to run. Good planning will result in good management. It is better to take decisions and actions in various forms of organization using the basic management process in the form of planning. In a plan, it is necessary to pay attention to the nature of a good plan to achieve the desired results.*

Keywords: *Islamic education management, Islamic education system, planning.*

Abstrak : *Planning atau perencanaan dibutuhkan oleh berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya perencanaan dalam system pendidikan Islam. Hasil menunjukkan bahwa dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan manajemen yang baik. Sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.*

Kata kunci: *Manajemen pendidikan Islam, perencanaan, system pendidikan Islam.*

PENDAHULUAN

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *to manage* yang berarti mengatur atau pengaturan sedangkan menurut istilah manajemen merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, meskipun tidak mengikuti rangkaian yang sistematis. Rangkaian itu berisi kegiatan menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan, serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara perorangan maupun bersama-sama.¹

Manajemen juga menempatkan suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian sehingga tercapai tujuan bersama dalam organisasi yang bersifat universal berlaku dan terdapat pada kepemimpinan di berbagai bidang kegiatan atau hidup manusia. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang bisa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen sehingga dalam arah organisasi dimulai dari menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antar sesama anggota organisasi serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya dalam pada setiap organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. Menurut Terry fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengaturan (*controlling*) sedangkan Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan dan penilaian.²

Artikel ini membahas secara mendalam mengenai fungsi perencanaan (*planning*) yang pada dasarnya merupakan langkah awal dalam dan sangat mempengaruhi fungsi-fungsi manajemen lainnya. Lebih lanjut, artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup perencanaan manajemen pendidikan, untuk mengetahui filosofi atau dasar dan proses perencanaan manajemen pendidikan dan untuk mengetahui model dan perencanaan pendidikan dalam SisDiknas .

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Perencanaan (*planning*) merupakan *process of setting objectives and determining what should be done to accomplishment* (proses penetapan tujuan dan hal yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut). Merencanakan pada dasarnya merupakan proses penentuan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa dalam proses perencanaan terdapat upaya penggunaan sumber daya

¹ Hadarawi Nawawi, dkk, *Kepemimpinan Yang Efektif*, (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm 75

² Hendiyat Soetopo dan Wasty Soetomo, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm 1

manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya yang lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan.

Menurut Roger A. Kauffman perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai atau sasaran yang akan dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (*the process of setting goals or targets to be achieved or targets to be achieved and specify the path and the resources needed to achieve goals effectively and efficiently*). Bateman dan Snell mengemukakan bahwa *planning is specifying the goals to be achieved and deciding in advance the appropriate actions needed to achieve those goals* (Perencanaan adalah menentukan tujuan yang harus dicapai dan memutuskan tindakan prioritas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut). Koontz menyerahkan perencanaan sebagai suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan ditempuh dan mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya, serta memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan proses menetapkan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain itu, kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebaiknya didasarkan pada fakta-fakta tepat yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan proses perencanaan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah 5W1H yaitu: 1) Apa (*what*) yang akan dilakukan, 2) Mengapa (*why*) hal tersebut dilakukan, 3) Siapa (*who*) yang melakukannya, 4) Dimana (*where*) melakukannya, 5) Kapan (*when*) dilaksanakan, 6) Bagaimana (*how*) melakukannya

Di dalam proses perencanaan ini dirumuskan tindakan awal sebelum melakukan aktivitas dalam suatu organisasi, perencanaan ini merupakan suatu penentu adanya perbedaan kinerja satu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan dan menyatakan yang membuat perencanaan tersebut karena sesungguhnya perencanaan itu memberikan arah, mengurangi pengaruh, perubahan, menumbuhkan penyumbangan dan menyusun ukuran untuk memudahkan proses-proses manajerial yang lain terutama fungsi pengawasan.⁴ Selain itu, perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai:

- 1) *Protective benefits*, yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber dan teknik/metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga mengurangi resiko keputusan.
- 2) *Positive benefits*, yaitu produktifitas dapat meningkat sejalan dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat.

Namun perlu dipahami bahwa fungsi perencanaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengambilan keputusan (*decision making*). Hal ini disebabkan karena pada dasarnya suatu keputusan merupakan suatu resolusi dari kemungkinan alternatif. Suatu keputusan bukanlah suatu rencana apabila di dalamnya tidak menyangkut baik tindakan

³ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), hlm 132

⁴ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), hlm 67

maupun masa yang akan datang. Keputusan sangat diperlukan pada hirarki preses perencanaan. Oleh karena itu, suatu yang sangat sulit untuk memisahkan antara proses perencanaan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam perencanaan, yaitu proses pengembangan dan pemulihan arah untuk memecahkan permasalahan tertentu. Keputusan harus diambil pada setiap titik dalam proses perencanaan.

Adapun ruang lingkup perencanaan dalam pendidikan meliputi: 1) Perencanaan dari dimensi waktu, 2) Perencanaan jangka panjang (*Long Term planning*) atau dalam jangka waktu 10 tahun ke atas, 3) Perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*) : Dalam jangka waktu 3-8 Tahun, 4) Perencanaan jangka pendek (*Short Term planning*): Dalam jangka waktu maksimal 1 tahun, 5) Perencanaan dari dimensi spasial, 6) Perencanaan nasional, 7) Perencanaan regional, 8) Perencanaan tata ruang, 9) Perencanaan proyek.⁵

DASAR FILOSOFI PERENCANAAN PENDIDIKAN

Pada dasarnya suatu perencanaan pendidikan / manajemen pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan cara yang sesuai jelas arah dan tujuan serta efektif dan efisien atas relevan isi kurikulumnya, apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu dasar tertentu. Yakni dasar yang kokoh, sebab adanya dasar yang kokoh itu dapat mengembangkan serta memberi perubahan pada pendidikan untuk menuju atau mencapai suatu tujuan dan arah yang jelas secara maksimal. Dan dengan adanya suatu dasar yang kokoh di dalam perencanaan itu merupakan pilar utama terhadap perkembangan dalam pendidikan profesional.

Pada suatu dasar perencanaan ini yaitu yang berdasarkan filosofis / filsafat. Karena dasar filosofis / filsafat ini sangat memicu sekali pada perencanaan pendidikan. Istilah dasar pada kamus besar bahasa Indonesia itu adalah landasan atau alas yaitu dikenal dengan pula sebagai fondasi, yang mana sebagai pengkokoh di dalam perencanaan pendidikan, hingga sampai pada evaluasi pendidikan (awal hingga akhir).⁶ Jadi dasar filosofis adalah landasan yang bersumber dalam filsafat pendidikan yang menyangkut dalam segala aspek dari keyakinan hakekat manusia, hakekat pengetahuan, sumber nilai serta kehidupan lebih baik dijalankan.⁷ Itu dikarenakan dari pengertian filosofis adalah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari suku kata *philein / philos* artinya cinta dan *sophos / sophia* yang artinya kebijaksanaan, dan secara maknawi filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakekat segala sesuatu.

Dimana landasan filosofis di dalam perencanaan pendidikan ini sangatlah penting pada kehidupan, yaitu pada pandangan hidup seseorang atau masyarakat yang merupakan sebagai suatu konsep dasar, mengenai dengan apa yang diinginkan dan dicita – citakan di dalam kehidupannya. Yang mana adalah suatu sikap sadar dan dewasa di dalam pemikiran untuk mengembangkan potensi, baik secara fisik maupun cipta dan karsa sebagai wujud nyata pengembangan itu dan dapat berfungsi guna perjalanan hidup sampai masa depan. Karena dasar perencanaan itu adalah suatu cita – cita manusia secara universal.⁸

⁵ Fattah Nanang, *landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya 1999), hlm 201

⁶ Suyitno. Y. 2009. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm 29

⁷ Mohammad Arif. 2010. *Teknologi Pendidikan*. Kediri: STAIN Kediri Press. hlm 24

⁸ Saefudin Sa'ud. 2005. *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm 23

Dasar atau landasan filosofis perencanaan pendidikan ini juga berkembang pada masa sebelumnya yaitu pada abad ke 18 – 25 lalu, dimana dasar filosofis pendidikan perencanaan ini bersumber pada filsafat pendidikan yakni yang menyangkut pada segala aspek (keyakinan, hakekat, sumber pengetahuan) dan cenderung untuk menuju pada masa depan yang akan datang. Akan tetapi pada zaman sekarang ini sangatlah berbeda dengan yang dahulu ataupun terdahulu. Dikarenakan pendidikan kini sudah berkembang jauh lebih canggih dengan adanya IPTEK serta pengaruhnya globalitas dunia, perkembangan pendidikan ini berkembang dengan pesat.

Dari pemikiran – pemikiran perencanaan atas dasar filosofis yang secara efektif dan efisien serta arah tujuan yang tepat dan didasari oleh suatu konsep interaksi / timbal balik antara satu dengan yang lainnya, baik pada lingkungan sekolah maupun masyarakat, maka dapat menimbulkan juga sebagai faktor pengembangan suatu pendidikan yang lebih baik. Pada dasar filosofis perencanaan pendidikan itu juga termasuk pada dasar yuridis. Dan dasar yuridis memiliki arti sebagai suatu peraturan baku, yakni sebagai tempat berpijak / tolak dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan tertentu. Sama hal ini dengan dasar filosofis perencanaan yang juga mengacu pada pemahaman dari landasan yaitu pijakan dari suatu hal titik tumpu tolak dari suatu hal yang sebagai fundasi dari perencanaan pendidikan. Karena apabila tanpa adanya atau tidak adanya suatu landasan atau dasar perencanaan pendidikan. Khususnya pada dasar filosofis ini, maka akan terjadi kerusakan atau tujuan dari perencanaan pasti terjadi suatu tidak keberhasilan. Yang mana begitu sangat pentingnya dasar filosofis pada perencanaan pendidikan.

Jadi seakan - akan dasar filosofis pada perencanaan pendidikan itu tidak bisa di ganggu gugat sudah menjadi rumusan, begitu pula hukum dasar yuridis yang dipandang sebagai aturan baku dan harus ditaati.⁹ Dengan dasar filosofis dan dasar yuridis itu dapat di contohkan, sebab memiliki suatu sifat material yakni sebagai suatu fondasi. Dimana fundasi itu sebagai pengokoh suatu hal yaitu pada perencanaan pendidikan khususnya. Sebagai contoh adalah Pancasila dan UUD yang mana bersifat konseptual sebagai dasar Negara Indonesia.¹⁰

Dasar filosofis ini sama akan obyek di dalam filsafat ilmu. Yaitu terdapat beberapa macam dengan melihat dari tingkat kebenaran secara rasio / logika / akal. Dan pada dasar filosofis dibagi menjadi 3 macam bagian, antara lain:

1) *Ontologi (Apa)*

Yaitu azas dalam menetapkan ruang lingkup, wujud yang menjadi obyek penelaahan / obyek formal serta penafsiran tentang hakekat realitas dari obyek tersebut.

2) *Epistimologi (Bagaimana)*

Yaitu azas mengenai cara, bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan (obyek formal dan material ilmu pendidikan).

3) *Aksiologi (Untuk Apa)*

⁹ Made Pirdata. 1997. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia. hlm 40

¹⁰ Suyitno. Y. *Op Cit* hlm 99

Yaitu azas yang menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan disusun dalam tubuh pengetahuan tersebut (tentang hakekat nilai kegunaan teoritis dan praktis ilmu pendidikan).¹¹

Itulah macam – macam dari dasar filosofi serta sebagai obyek dari dalam filsafat ilmu pendidikan. Yang mana pendidikan dihadapkan pada perumusan tujuan yang sangat mendasar dan mendalam, sehingga diperlakukan analisa dan pemikiran filosofis.

Selain itu semua perumusan tujuan, seluruh aspek dalam pendidikan mulai dari konsep, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi membutuhkan pemikiran yang filosofis.¹² Sebab dari dasar filosofis itu mengemukakan suatu kebenaran, maksudnya adalah yang sesuai dan yang dapat dimengerti. Dengan adanya suatu pengungkapan kebenaran itu, maka timbullah dasar filosofis dengan macam-macamnya sebagai pertanyaan 3 dasar (Apa, Bagaimana, Untuk Apa).

Pertanyaan dari dasar filosofis ini sangatlah penting untuk acuan sebagai konsep perkembangan suatu perencanaan dalam pendidikan. Filosofis atau filsafat itu lebih mengandung isi studi tentang pertanyaan daripada jawaban. Di mana filsafat ini banyak mencakup di segala aspek di kehidupan dari pendidikan, pribadi manusia, masyarakat, masalah kosmos, dan lain sebagainya. Untuk suatu kebenaran hingga sampai masa depan yang akan datang.¹³

TAHAP-TAHAP DALAM PERENCANAAN

Pada dasarnya semua kegiatan perencanaan melalui empat tahapan dasar sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
- 2) Tahap kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau berbagai sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
- 3) Tahap ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan.
- 4) Tahap keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan ini meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.¹⁴

Sedangkan menurut Banghart dan Trull, tahapan-tahapan perencanaan meliputi:

- 1) Menentukan masalah perencanaan, meliputi:
 - a. Gambaran ruang lingkup permasalahan

¹¹ Mohammad Arif. *Op Cit.* hlm. 26

¹² Abdullah. 2001. *filsafat Ilmu*. Bandung: Rosdakarya, hlm 80

¹³ Prasetia. 2003. *filsafat Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm 85

¹⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Edisi II, Cet. VIII; Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2003), hlm 79

- b. Mempelajari berbagai hal yang telah terjadi
 - c. Menetapkan apa yang ada dan yang seharusnya ada atau kenyataan dan harapan
 - d. Sumber-sumber dan keterbatasannya
 - e. Mengembangkan bagian-bagian perencanaan dan prioritasnya
- 2) Analisis masalah perencanaan, meliputi:
 - a. Mengkaji permasalahan dan sub masalah
 - b. Pengumpulan data dan tabulasi data
 - c. Meramalkan memproyeksikan
 - 3) Konsep dan desain perencanaan, mencakup:
 - a. Identifikasi kecenderungan yang ada
 - b. Merumuskan tujuan umum dan khusus
 - c. Menyusun rencana
 - 4) Evaluasi rencana, mencakup:
 - a. Simulasi rencana
 - b. Evaluasi rencana
 - c. Memilih rencana
 - 5) Spesifikasi atau merumuskan rencana, mencakup:
 - a. Merumuskan masalah
 - b. Menyusun hasil rumusan dalam bentuk *final plan draf* atau rencana akhir
 - 6) Implementasi rencana, meliputi:
 - a. Persiapan rencana operasional
 - b. Persetujuan dan Pengesahan rencana
 - c. Mengatur aparat organisasi
 - 7) Balikan pelaksanaan rencana, mencakup:
 - a. Monitoring rencana
 - b. Evaluasi pelaksanaan rencana
 - c. Mengadakan penyesuaian, perubahan atau merancang yang perlu dirancang lagi, bagaimana perancangannya dan oleh siapa.¹⁵

MODEL DAN PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM SISDIKNAS

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Hoetomo menterjemahkan model sebagai contoh, pola acuan ragam, macam, atau barang tiruan yang kecil dan tepat seperti yang ditiru.¹⁶ Perencanaan (*planning*) menurut Newman dalam Manullang, "*Planning is deciding in advance what is to be done*".¹⁷ Jadi perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Sedangkan Louis Allen mengatakan "*Planning is the determination of a*

¹⁵ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010), . hlm 136

¹⁶ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005)

¹⁷ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001)

course of action to achieve a desired result”, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian, model perencanaan dapat diartikan sebagai pola atau contoh atau acuan yang digunakan dalam penyusunan sebuah perencanaan. Model perencanaan dalam lingkup pendidikan, diartikan sebagai pola atau acuan, dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Tetapi model perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan model perencanaan pengajaran, perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Sedangkan model perencanaan pengajaran sebagaimana dilakukan oleh Lukman Hakim bahwa model perencanaan pengajaran memuat komponen sistem pembelajaran dan unsur kegiatan yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa dalam proses pembelajaran.¹⁸ Perencanaan berkaitan dengan bagaimana cara, strategi, atau kegiatan yang dilakukan agar siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan.

MACAM-MACAM MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN

Perencanaan merupakan petunjuk mengenai apa yang akan dilakukan, akan tetapi jika perencanaan tersebut disusun dengan begitu padat, ketat, kaku, dan tidak manusiawi, maka dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, karenanya perencanaan untuk menjadi alat yang berguna menurut Harjanto perlu juga dipakai dalam suatu kombinasi yang harmonis dengan alat lainnya seperti pengawasan dan evaluasi.¹⁹ Lebih lanjut ia mengatakan, suatu rencana yang baik senantiasa menjadi alat petunjuk arah dan sekaligus merupakan kiat yang lentur dan fleksibel.

Ada beberapa model perencanaan pendidikan yang dikemukakan para ahli pendidikan, diantaranya Dr. Nanang Fattah dan Dr. Husaini Usman mengemukakan empat model perencanaan pendidikan,²⁰ yaitu:

1) Model Perencanaan Komprehensif

Model ini terutama digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas.

2) Model Target Setting

Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam persiapannya dikenal:

- a. Model untuk menganalisis demografis dan proyeksi penduduk.
- b. Model untuk memproyeksikan enrolmen (jumlah siswa terdaftar) sekolah.
- c. Model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja.

¹⁸ Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008)

¹⁹ Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

²⁰ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

3) Model Costing dan keefektifan biaya

Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan, dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan, diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu.

4) Model PPBS

PPBS (planning, programming, budgeting system) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Beberapa ahli memberikan pengertian, antara lain: Kast Rosenzweig (1979) mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program, untuk dicapai, menemukan besarnya biaya, alternatif dan menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Sedangkan Harry J. Hartley (1968) mengemukakan bahwa PPBS merupakan proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi program budget sebagai komponen utamanya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa: PPBS merupakan pendekatan yang sistematis. Oleh karena itu, untuk menerapkan PPBS diperlukan pemahaman tentang konsep dan teori sistem. Serta PPBS merupakan suatu proses perencanaan komprehensif. Penerapannya hanya dimungkinkan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dalam organisasi yang dihadapkan pada masalah yang rumit dan komprehensif.

Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat-sifat esensial dari sistem ini. Esensi dari PPBS adalah sebagai berikut:

- 1) Memperinci secara cermat dan menganalisis secara sistematis terhadap tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Mencari alternatif-alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan.
- 3) Menggambarkan biaya total dari setiap alternatif, baik langsung ataupun tidak langsung, biaya yang telah lewat ataupun biaya yang akan datang, baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang.
- 4) Memberikan gambaran tentang efektifitas setiap alternatif dan bagaimana alternatif itu mencapai tujuan.
- 5) Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari kombinasi yang memberikan efektifitas yang paling besar dari sumber yang ada dalam pencapaian tujuan.

PENTINGNYA POSISI PERENCANAAN BAGI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Tidak ada formula yang sederhana untuk membuat sebuah rencana. Pertama-tama sebuah rencana pada dasarnya merupakan sekumpulan dugaan-dugaan tentang masa depan, karena penetapan-penetapan prioritas memerlukan perkiraan-perkiraan yang tidak tentu mengenai kemungkinan hasil-hasilnya, manfaat-manfaat dan biaya-biayanya, yang terbaik yang bisa dilakukan adalah membandingkan masa lampau dengan masa sekarang dalam mencari petunjuk-petunjuk untuk masa depan. Jadi sebuah rencana dibuat berdasarkan filosofi umum tentang bagaimana pembangunan itu terjadi. Filosofi ini menjadi dasar dugaan-dugaan yang harus dibuat dalam menetapkan sebuah rencana.²¹

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang terinterpendensi dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya. Fungsi dari setiap keputusan publik juga diintegrasikan dengan keputusan lainnya yang sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka. Secara politik setiap keputusan pada tingkat tertentu akan melewati mekanisme konstitusi. Dalam hal ini fungsi legislatif DPR atau MPR sangat menentukan terhadap keputusan mengenai pendidikan secara keseluruhan baik pada tingkat makro maupun mikro, karena kebijakan pada tingkat yang lebih rendah harus berdasarkan kebijakan ditingkat yang lebih atas.

Menurut Pidarta, strategi yang dipakai dalam perencanaan ada dua macam, yaitu dalam perencanaan strategi dan dalam analisa metode dan alat. Strategi disini dimaksudkan bagaimana menyelesaikan aktifitas-aktifitas yang dikembangkan dalam analisa sistem, yaitu dengan mencari alternatif-alternatif pemecahan masalah.²²

Masih menurut Pidarta, perencanaan pendidikan nasional Indonesia dapat dibagi menjadi tiga tipe, yaitu perencanaan makro, meso, dan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang mencakup pendidikan seluruh bangsa. Pada umumnya ditangani oleh pemerintah pusat. Atau dapat juga ditangani oleh kelompok tertentu tetapi mereka ditunjuk oleh pemerintah pusat dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat juga.²³

Sedangkan perencanaan meso adalah perencanaan yang ruang lingkupnya adalah mencakup wilayah pendidikan tertentu, misalnya satu provinsi. Dasar terjadinya perencanaan meso adalah akibat dari kondisi dan situasi suatu daerah yang berbeda-beda. Perencanaan pendidikan untuk daerah-daerah tidak dapat dibuat sama, melainkan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Adapun tugas perencanaan pusat hanya sebagai pelindung, konsultan dan penilai.

Perencanaan pendidikan mikro diprakarsai oleh manajer atau tim manajer di lembaga pendidikan masing-masing. Dalam mengembangkan lembaga atau memperbaiki lembaga, tiap-tiap manajer dalam lembaga pendidikan itu mempunyai kewajiban untuk mengadakan perencanaan mikro. Perencanaan ini mencakup segala macam aktivitas dalam lembaga. Dasar

²¹ Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 17

²² Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 73

²³ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan ...* hlm. 73

kewenangan mengadakan perencanaan mikro adalah hak seorang manajer pendidikan dalam mengendalikan lembaganya dan fleksibilitas peraturan dari pemerintah pusat. Fleksibilitas aturan ini didasarkan pula atas kenyataan bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu tidak persis sama kondisi dan situasinya.²⁴

Perencanaan pendidikan komprehensif mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara sistematis dan sistemik. Seluruh aspek penting pendidikan mesti tercakup dan disusun secara teratur dan rasional sehingga membentuk satu keseluruhan yang lengkap dan sempurna. Kelengkapan dan keteraturan dalam pola dasar yang sistemik inilah merupakan ciri utama perencanaan yang komprehensif.

Proses perencanaan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Sehingga sasaran pendidikan akan tercapai sesuai dengan tujuan yang digariskan. Tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dijabarkan dalam lima perangkat sasaran pendidikan, yaitu sikap dan nilai, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kesadaran ekologi, dan kemampuan komunikasi.²⁵

Tujuan dari lima perangkat sasaran pendidikan tersebut masih bersifat universal dan masih perlu diperkenalkan ke dalam system pendidikan nasional agar sesuai dengan masalah negara dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu tujuan dari lima perangkat sasaran pendidikan tersebut masing-masing dan dalam keseluruhannya, harus diorientasikan kepada aspek-aspek nasional sebagai berikut:

- 1) Dalam aspek misi nasional pendidikan Indonesia mengandung fungsi: pembinaan moral; pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa; pembinaan ketahanan nasional.
- 2) Dalam aspek sosial budaya, pendidikan Indonesia mengembangkan fungsi pembinaan kebudayaan; pembinaan hak asasi manusia; pembinaan hidup berdemokrasi; pembinaan kesadaran penegakan hukum.
- 3) Dalam aspek pembangunan dan modernisasi pendidikan Indonesia mengembangkan fungsi pembinaan sikap nasional; pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ketiga aspek nasional pendidikan tersebut di atas satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan, satu perangkat yang tak terpisahkan.²⁶

Bertolak dari dasar-dasar pemikiran dan aspek nasional pendidikan seperti itulah tujuan pendidikan nasional Indonesia dirumuskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sehingga rumusannya adalah sebagai Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²⁴ Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan ...* hlm. 73

²⁵ Abdullah Alhadza, *Dimensi-Dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional* (Makasar: Umitoha, 2005), hlm. 21

²⁶ Abdullah Alhadza, *Dimensi-Dimensi Kardinal ...* hlm. 21

POSISI PERENCANAAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Sistem pendidikan yang berlaku adalah *effort* yang sudah melembaga dan berperan sebagai aset dalam kegiatan pembangunan pendidikan. Melalui sistem pendidikan itulah segala kegiatan perencanaan seyogyanya dilaksanakan, dan dimulai. Melalui sistem itu pulalah seluruh upaya pembangunan pendidikan diwujudkan. Kedudukan sistem sebagai mekanisme perencanaan dan basis perencanaan mempunyai arti lain bila ditinjau dari sisi metodologi.²⁷

Salah satu alat kebijakan pemerintah yang terindependensi dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya adalah perencanaan pendidikan. Proses penerapan pendidikan di Indonesia diarahkan pada relevansi, efisiensi, dan efektivitas. Diharapkan agar optimalisasi kerja manajemen pendidikan berjalan dengan baik. Salah satu bentuk pelaksanaan dari perencanaan pendidikan di Indonesia adalah berkenaan dengan penerapan desentralisasi pendidikan yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS). Melalui penerapan MBS akan berimplikasi kepada perubahan sistem perencanaan pendidikan yang ada di Indonesia.

Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya MBS yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur dan merencanakan pendidikan dan pembelajaran serta mengatur, merencanakan, mengorganisir, mengawasi, mempertanggungjawabkan dan memimpin sumber daya manusia serta sarana lainnya dalam rangka membantu proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Tujuan utama MBS adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat dan orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (*stakeholder*), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan.²⁸

MBS yang didalamnya terdapat proses perencanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Untuk itulah perlu dipahami fungsi pokok manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan.

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola sekolah atau pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan serta

²⁷ Udin Saefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehensif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 45

²⁸ Udin Saefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan satu ...* hlm. 37

memberdayakan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme.

Pelaksanaan MBS memerlukan upaya penyesuaian, sehingga pelaksanaan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, efisien dan relevan dengan keperluannya.²⁹

CONTOH PERENCANAAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Dalam suatu lembaga pendidikan dibutuhkan berbagai macam perencanaan dalam manajemen pendidikan. Di bawah ini adalah contoh dari perencanaan dalam lembaga pendidikan:

1) Perencanaan Operasional:

- a. Rencana sekali pakai: dikembangkan untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa mendatang. Contohnya: Program, yaitu rencana sekali pakai untuk serangkaian aktivitas besar; Proyek, yaitu rencana sekali pakai untuk lingkup yang lebih sempit dan lebih tidak kompleks dibandingkan dengan program.
- b. Rencana tetap: dikembangkan untuk aktivitas yang berulang secara teratur selama satu periode waktu tertentu. Contohnya: Kebijakan, rencana tetap yang merinci respons umum organisasi terhadap suatu masalah atau situasi tertentu; Prosedur operasi standar, rencana tetap yang menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu masalah atau situasi tertentu; Aturan dan peraturan, rencana tetap yang mendeskripsikan dengan tepat bagaimana aktivitas tertentu dilaksanakan.

2) Perencanaan menurut waktunya

a. Program jangka pendek

Ketika sebuah pabrik mobil siap untuk mengganti teknologinya, manager memusatkan perhatian mereka pada penggantian peralatan yang ada dengan peralatan yang baru secepat mungkin dan seefisien mungkin untuk meminimalkan hilangnya waktu produksi. Dalam banyak kasus, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bulan, dan produksi hanya terhenti selama beberapa minggu. Dengan demikian, suatu rencana tindakan mengoordinasikan berbagai perubahan aktual pada suatu pabrik tertentu. Sebaliknya rencana reaksi adalah rencana yang dirancang untuk membuat perusahaan dapat bereaksi terhadap situasi yang tak terduga. Di salah satu pabrik Nissan, peralatan baru tiba lebih awal dari yang diharapkan dan manager pabrik harus menutup produksi lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Oleh karena itu, manager tersebut harus bereaksi terhadap kejadian yang berada di luar kendali mereka dalam cara yang masih memungkinkan tercapainya tujuan.

b. Program jangka menengah

²⁹ Nasrun, Urgensi Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edu-Physic*, Vol 4 Tahun 2013, hlm: 78-79

Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. Rencana jangka menengah biasanya meliputi periode satu hingga lima tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini.

c. Program jangka panjang

Suatu rencana jangka panjang (long-range plan) meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade.

KESIMPULAN

Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Perencanaan yang baik akan menghasilkan manajemen yang baik. Sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Alhadza, *Dimensi-Dimensi Kardinal dalam Manajemen Pendidikan Nasional* (Makasar: Umitoha, 2005)
- Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta , 2010)
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta , 2010)
- Fattah Nanang, *landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya 1999)
- Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Hadarawi Nawawi, dkk, *Kepemimpinan Yang Efekif*, (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002)
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Hendiyat Soetopo dan Wasty Soetomo, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1998)
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005)
- Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Wacana Prima, 2008)

- Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Made Pirdata *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.1997
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001)
- Mohammad Arif. *Teknologi Pendidikan*. Kediri: STAIN Kediri Press.2010
- Nasrun, Urgensi Perencanaan dalam Manajemen Pendidikan dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal Edu-Physic*, Vol 4 Tahun 2013
- Prasetia, *filsafat Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2003
- Saefudin Sa'ud. *Perencanaan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2005
- Suyitno. Y, *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.2009
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Ciputat Press, 2005)
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Edisi II, Cet. VIII; Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003)
- Udin Saefudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan Satu Pendekatan Komprehensif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)